

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PANTAI LAKBAN KABUPATEN MINAHASA TENGGARA ¹

Oleh :

Merry Virginia Agow², Daud M. Liando³, Alfon Kimbal ⁴

ABSTRAK

Objek wisata Pantai Lakban merupakan objek wisata andalan Kabupaten Minahasa Tenggara yang terletak di Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok. Pengembangan pariwisata Pantai Lakban seharusnya bisa membawa manfaat ekonomi untuk meningkatkan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur. Akan tetapi, kenyataannya pengembangan pariwisata Pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kurang memperhatikan dan kurang melibatkan partisipasi masyarakat desa Ratatotok Timur, yang mengakibatkan dampak dari pengembangan tersebut kurang bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dari data yang dimiliki padahal kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban terbilang cukup baik. kurangnya pelibatan partisipasi masyarakat tersebut menyebabkan rasa memiliki (sense of belonging) dari masyarakat terhadap program pemerintah dalam mengembangkan potensi wisata di Pantai Lakban menjadi berkurang. Mengapa pemerintah kurang melibatkan masyarakat dalam pengembangan potensi wisata di Pantai Lakban menjadi sebuah problem yang menarik untuk di teliti. Karena seharusnya program pengembangan pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah wajib melibatkan masyarakat. Penelitian ini akan mencoba mengidentifikasi bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pengembangan potensi wisata Pantai Lakban dan factor-faktor yang menghambat partisipasi masyarakat mereka.

Kata Kunci : Partisipasi, Kemampuan, Kemauan, Kesempatan,

PENDAHULUAN

Objek wisata Pantai Lakban merupakan objek wisata andalan Kabupaten Minahasa Tenggara yang terletak di Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok. Pada dasarnya, Pantai Lakban dibangun oleh PT. Newmont Minahasa Raya untuk meningkatkan perekonomian yang berkelanjutan bagi masyarakat Ratatotok - Buyat (termasuk Desa Ratatotok

¹ Merupakan tesis Penulis

² Mahasiswa Program Studi PSP Pascasarjana UNSRAT

³ Selaku Pembimbing 1 saat penulisan tesis

⁴ Selaku Pembimbing 2 saat penulisan tesis

Timur) pasca penutupan tambang oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata juga telah mengatur bahwa masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja/buruh, konsinyasi, dan pengelolaan. Sehingga, pengembangan pariwisata di Pantai Lakban seharusnya bisa membawa manfaat ekonomi bagi peningkatan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur.

Akan tetapi, berdasarkan pengamatan awal peneliti ditemukan bahwa pengembangan pariwisata Pantai Lakban yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara ternyata kurang melibatkan dan kurang memperhatikan masyarakat desa Ratatotok Timur. Hal ini didukung oleh fakta empirik bahwa pengambilan keputusan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara tanpa melibatkan masyarakat desa Ratatotok Timur. Sehingga, aspirasi-aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban tidak terakomodasi dengan baik. Masyarakat hanya dihimbau untuk turut serta menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan, yang notabene tidak berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat desa Ratatotok Timur. Akhirnya, Pantai Lakban belum mampu memberikan manfaat yang optimal dalam meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup masyarakat desa Ratatotok Timur.

Dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban, pemerintah harus melibatkan masyarakat khususnya masyarakat desa Ratatotok Timur karena masyarakat desa Ratatotok Timur banyak mengetahui tentang kondisi Pantai Lakban dan sekitarnya yang bermanfaat bagi pengembangan pariwisata berkelanjutan di Pantai Lakban. Partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan, hingga evaluasi sangat menentukan keberlanjutan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban. Partisipasi masyarakat juga menentukan kesejahteraan serta peningkatan mutu hidup yang bisa dinikmati oleh masyarakat serta perolehan manfaat ekonomi yang bisa diterima oleh pemerintah. Alasan inilah yang mendorong peneliti untuk melaksanakan penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban Kabupaten Minahasa Tenggara.

Dengan demikian, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban Kabupaten Minahasa Tenggara. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperoleh temuan-temuan baru yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan sektor pariwisata di Kabupaten Minahasa Tenggara, khususnya di Pantai Lakban. Sehingga, aset daerah dapat memberikan nilai manfaat ekonomi yang optimal terutama bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Minahasa Tenggara.

TINJAUAN PUSTAKA

Pada dasarnya, penelitian yang berkaitan dengan pariwisata sudah banyak dilakukan, termasuk dalam lingkup ilmu pemerintahan. Terdapat beberapa penelitian terkait partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata. Relevansi penelitian partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban Kabupaten Minahasa Tenggara terdapat pada penelitian Budianda (2000) dan Gaghenggang (2016) dimana partisipasi masyarakat masih kurang. Masyarakat kurang dilibatkan khususnya dalam tahap pengambilan keputusan atau perencanaan. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada penelitian Dalimunthe (2007) dan Suarthana (2015) dimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata terbilang cukup baik. Masyarakat secara aktif terlibat dan mendukung dalam setiap proses pengembangan pariwisata.

Adapun partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan atau keikutsertaan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam proses pembangunan yang meliputi tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan tahap pemanfaatan hasil pembangunan. Theresia, A., et al., (2014:197) mendefinisikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagai perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka. Menurut Theresia, A., et al. (2014:198), lingkup partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan;
3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan; dan
4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan.

Menurut Slamet dalam Theresia, A., et al. (2014:207), partisipasi masyarakat dalam pembangunan sangat ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi; dan
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Adapun pariwisata merupakan suatu kegiatan perjalanan ke daerah lain yang dilakukan untuk sementara waktu dengan maksud untuk memenuhi berbagai keinginan kecuali memperoleh penghasilan. Yoeti (2016:8) mengemukakan kriteria atau syarat suatu perjalanan disebut sebagai perjalanan wisata, yaitu:

- 1) Perjalanan dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain (*from one place to another place*). Perjalanan dilakukan diluar tempat kediaman dimana orang itu biasanya tinggal.
- 2) Perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih (*more than 24 hours*), kecuali bagi *excursionist* (kurang dari 24 jam).

- 3) Tujuan perjalanan semata-mata untuk bersenang-senang (*to pleasure*) tanpa mencari nafkah di negara, kota atau daerah tujuan wisata yang dikunjungi.
- 4) Uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya dimana ia biasanya tinggal atau berdiam dan bukan diperoleh karena hasil usaha selama dalam perjalanan wisata yang dilakukan.

Selanjutnya, pengembangan pada dasarnya adalah hal, usaha, atau cara untuk mengembangkan sesuatu kearah yang lebih baik. Sehingga, pengembangan pariwisata merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk menggali, memperbaiki dan memajukan potensi yang ada di suatu daerah tujuan wisata baik secara fisik maupun sosial. Tujuan utama dari pengembangan kepariwisataan adalah untuk meningkatkan nilai manfaat ekonomi dari sektor pariwisata.

Pengembangan pariwisata harus memperhatikan komponen-komponen tertentu yang bermanfaat bagi keberhasilan pengembangan pariwisata. Menurut Yoeti (2016:16), dalam pariwisata terdapat tiga unsur inti yang harus dimiliki yaitu:

1. Aksesibilitas
Termasuk dalam kelompok ini adalah bandara, pelabuhan, terminal, jalan raya, jembatan, telekomunikasi, atau transportasi, pembangkit tenaga listrik dan persediaan air bersih. Pada dasarnya semua prasarana yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk datang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, tanpa itu tidak mungkin pariwisata dikembangkan sebagai suatu industri.
2. Fasilitas
Yaitu semua bentuk fasilitas yang memberikan pelayanan bagi wisatawan untuk segala kebutuhan selama tinggal atau berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, seperti hotel, restoran, pusat perbelanjaan, toko souvenir, bank, dan money changer.
3. Atraksi
Yaitu semua objek dan atraksi yang tersedia sebagai daya tarik, termasuk *natural resources, cultural resources, theme parks, sport activities dan events*. Atraksi harus memenuhi tiga syarat yaitu apa yang dapat dilihat (*something to see*); apa yang dapat dilakukan (*something to do*); dan apa yang dapat dibeli (*something to buy*).

Varesci (2001:20) menjelaskan bahwa selama ini pembangunan pariwisata dilakukan dengan mengesampingkan penduduk setempat. Masyarakat hanya menjadi penonton dari proyek-proyek pariwisata yang dibangun. Cara ini untuk jangka panjang berbahaya, karena dapat menciptakan kecemburuan sosial. Mengikutsertakan penduduk setempat dalam pelaksanaan proyek dan bahkan dalam pengelolaan justru memberi manfaat dan keuntungan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Partisipasi masyarakat berhubungan dengan keterlibatan seluruh komponen dalam proses pengambilan keputusan (*decision making*) terhadap perencanaan yang akan dilakukan di kawasan yang akan ditingkatkan menjadi daerah tujuan wisata. Penduduk lokal yang terdiri dari berbagai kelompok etnis dengan berbagai kepentingan, hendaknya dapat bersinergi

dalam menentukan nilai-nilai sosial yang diakui, serta ide dan tujuan pengembangan suatu daerah menjadi suatu daerah tujuan wisata.

Adapun Tosun (1999:5) mengembangkan suatu tipologi partisipasi masyarakat dalam pariwisata dengan mengklasifikasikan tipe-tipe partisipasi masyarakat ke dalam tiga bagian utama, yang masing-masing memiliki sub-bagian. Ketiga bagian utama tersebut adalah partisipasi masyarakat secara spontan (*spontaneous participation*), partisipasi masyarakat karena adanya kekerasan (*coersive participation*), dan partisipasi masyarakat karena masyarakat terdorong untuk melakukannya (*induced participation*).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu di Desa Ratatotok Timur dan Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara di Ratahan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara. Data sekunder dalam penelitian ini adalah segala hal yang berhubungan dengan konsep, teori, referensi-referensi, baik yang bersumber dari buku, majalah, jurnal, maupun hasil penelitian lainnya. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Informan dalam penelitian ini terdiri dari masyarakat sekitar objek wisata Pantai Lakban dan pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Instrumen utama pengumpulan data adalah peneliti sendiri, sedangkan metode pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Penelitian ini memfokuskan pada partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi pariwisata di Pantai Lakban Kabupaten Minahasa Tenggara. Untuk meneliti fokus dari penelitian ini maka peneliti memutuskan untuk menggunakan tiga unsur pokok partisipasi masyarakat menurut Slamet dalam Theresia, A., et al. (2014:207), yaitu:

1. Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi;
2. Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi; dan
3. Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Karena bersifat kualitatif, sehingga data yang terkumpul dalam penelitian ini diolah dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan kata-kata yang disusun kedalam teks yang diperluas. Analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah semua data yang telah tersedia dari berbagai sumber baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh direduksi untuk kemudian disajikan dan ditarik kesimpulan dan verifikasi. Waktu penelitian dilaksanakan selama empat bulan yaitu bulan Februari sampai bulan Mei 2017.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pantai Lakban terletak di Desa Ratatotok Timur, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara. Pantai Lakban merupakan salah satu hasil dari pembangunan berkelanjutan pasca penutupan tambang oleh PT. Newmont Minahasa Raya. Objek wisata Pantai Lakban merupakan salah satu hasil dari pembangunan berkelanjutan pasca penutupan tambang oleh PT. Newmont Minahasa Raya (Mamonto, P. D. L., et al., 2012:6). Tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut yaitu:

1. Untuk menciptakan reklamasi hutan yang dapat berlangsung terus menerus setelah tambang ditutup;
2. Untuk menciptakan industri baru bagi masyarakat yang dapat berlangsung terus menerus setelah tambang ditutup; dan
3. Untuk menciptakan masyarakat yang mandiri dan percaya diri setelah penutupan.

Tiga pilar utama dan program dari pembangunan berkelanjutan ini adalah:

- 1) Lingkungan yang berkelanjutan
 - a) Artificial coral reef;
 - b) Rehabilitasi mangrove; dan
 - c) Reklamasi hutan.
- 2) Ekonomi yang berkelanjutan
 - a) Menciptakan area pariwisata; dan
 - b) Membangun industri baru (kerjasama-kerjasama / komunitas masyarakat, ice block / cold storage).
- 3) Masyarakat yang berkelanjutan
 - a) Membangun yayasan masyarakat, yaitu:
 - 1) Yayasan Minahasa Raya,
 - 2) Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Sulawesi Utara, dan
 - 3) Yayasan Pembangunan Berkelanjutan Ratatotok – Buyat (Rayat).

Menurut Nurman (2015:207), pelaksanaan pembangunan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah menyangkut urusan pilihan dalam hal ini sektor pariwisata, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata dapat memberi manfaat dan keuntungan bagi pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dibawah kepemimpinan Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Ronald Kandoli, telah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor andalan perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara. Hal tersebut tercantum dalam Misi Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2018 atau dikenal sebagai 5 (lima) sukses, pada poin ketiga yaitu Sukses Perekonomian, sebagai berikut: "Mewujudkan Perekonomian yang handal berbasis potensi bahari, pertanian, perkebunan (kelapa) dan pariwisata serta iklim investasi dan kesempatan berusaha yang semakin kondusif (Sukses Perekonomian)"

Selain itu, Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033 menyatakan bahwa tujuan penataan ruang di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan terpadu di Kabupaten Minahasa Tenggara yang mengedepankan Agroindustri, Perikanan, dan Pariwisata.

Adapun Pantai Lakban dikelola dan dikembangkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata untuk Pantai Lakban di tahun 2016 adalah kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata dengan anggaran sebesar Rp. 961.841.000 untuk pembangunan berupa:

1. Rabat beton dan rehap atap tribun;
2. Pembangunan gedung aula pertemuan; dan
3. Pembangunan gerbang/gapura masuk Pantai Lakban.

Selanjutnya, program yang sama untuk tahun 2017 yaitu kegiatan penataan kawasan pariwisata sebesar dengan anggaran sebesar Rp. 1.367.308.000 untuk pembangunan berupa:

1. Toilet/ruang ganti;
2. Kios cenderamata; dan
3. Jalan setapak di Pantai Lakban.

Tarif retribusi yang berlaku di Pantai Lakban adalah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, yaitu:

1. Kendaraan roda dua : Rp. 3.000 / kendaraan;
2. Kendaraan roda empat : Rp. 5.000 / kendaraan;
3. Kendaraan roda enam : Rp. 7.500 / kendaraan;
4. Dewasa : Rp. 3.000 / orang
5. Anak-anak : Rp. 2.000 / orang
6. Retribusi tribun / teater terbuka : Rp. 1.000.000 / kegiatan
Rp.500.000 / kegiatan hari kedua, dst.
7. Retribusi gedung aula : Rp. 1.000.000 / kegiatan
Rp. 500.000 / kegiatan hari kedua, dst.

Selain itu, berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Destinasi antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dengan masyarakat yang melakukan usaha berupa kios dan penyewaan kapal di Pantai Lakban, ditentukan tarif sewa perbulan yaitu:

1. Retribusi kios makanan: Rp. 30.000 / bln
2. Retribusi penyewaan kapal: Rp. 30.000 / bln

Partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan dan atau keikutsertaan masyarakat secara sadar dan sukarela dalam proses pembangunan yang meliputi tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap pemantauan dan evaluasi pembangunan, dan tahap pemanfaatan hasil pembangunan. Theresia, A., et al., (2014:197) mendefinisikan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sebagai perwujudan dari kesadaran dan kepedulian serta tanggung jawab

masyarakat terhadap pentingnya pembangunan yang bertujuan untuk memperbaiki mutu-hidup mereka.

Sejak diberlakukannya sistem desentralisasi, daerah-daerah terdorong untuk mencari dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya, termasuk potensi pariwisata. Pengembangan pariwisata bermanfaat untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan dan meningkatkan perolehan nilai manfaat ekonomi dari sektor pariwisata. Bagi pemerintah daerah, hasil dari pengembangan pariwisata dapat meningkatkan pendapatan asli daerah yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan umum kepada masyarakat. Bagi masyarakat sekitar pengembangan objek wisata, pengembangan pariwisata tersebut dapat membawa manfaat berupa menambah lapangan pekerjaan, menambah kesempatan membangun usaha, dan meningkatkan serta menumbuhkan kebudayaan yang ada di daerah pengembangan pariwisata. Pantai Lakban menjadi sumber utama pendapatan asli daerah (PAD) dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Minahasa Tenggara serta menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat desa Ratatotok Timur.

Adapun unsur kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban masih kurang. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban Kabupaten Minahasa Tenggara salah satunya dapat dilihat dari kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil pembangunan. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat tidak memiliki kapasitas dan kewenangan untuk turut memutuskan pengembangan pariwisata yang akan dilaksanakan di Pantai Lakban. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka namun aspirasi-aspirasi tersebut sering tidak didengar oleh pemerintah.

Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban juga masih kurang. Dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di Pantai Lakban masyarakat hanya memiliki kesempatan untuk terlibat sebagai buruh dari pihak ketiga. Masyarakat juga tidak diberikan kesempatan untuk terlibat sebagai panitia dalam kegiatan tahunan Kabupaten Minahasa Tenggara, yaitu Festival Bentenan Lakban. Masyarakat Ratatotok Timur yang bertugas sebagai tenaga kontrak (petugas kebersihan) di Pantai Lakban juga hanya ada satu orang. Akan tetapi, masyarakat diberikan kesempatan untuk turut serta menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan di Pantai Lakban.

Pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan, masyarakat diberikan kesempatan untuk memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan di Pantai Lakban. Hal ini dapat dilihat mulai kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan kios-kios yang ada di Pantai Lakban hingga mengambil manfaat dari kegiatan Festival Bentenan Lakban. Walaupun, hingga saat ini masyarakat desa Ratatotok Timur belum pernah mendapatkan pemasukan langsung dari pendapatan retribusi yang diperoleh dari Pantai Lakban.

Unsur kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban terbilang cukup baik. Pada tahap pengambilan keputusan, walaupun masyarakat tidak diberikan kesempatan untuk mengambil keputusan namun masyarakat mau untuk menyuarakan aspirasi-aspirasi mereka untuk mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata di Pantai Lakban.

Pada tahap pelaksanaan kegiatan, masyarakat juga memiliki kemauan untuk berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan Festival Bentenan Lakban. Dalam pelaksanaan pembangunan di Pantai Lakban, masyarakat memiliki kemauan untuk menjadi buruh dari pihak ketiga. Masyarakat juga memiliki kemauan untuk turut serta menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan.

Pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan, masyarakat memiliki kemauan untuk meningkatkan kesejahteraan dengan memanfaatkan kios-kios yang ada di Pantai Lakban. Akan tetapi, kemauan masyarakat untuk memproduksi dan menjual souvenir atau cenderamata khas Pantai Lakban masih kurang. Dari sekian banyak kios yang ada di Pantai Lakban, hanya ada satu kios yang menjual souvenir atau cenderamata khas Pantai Lakban. Selain itu, dari total 254 KK yang ada di desa Ratatotok Timur, baru ada sekitar 13 KK yang berprofesi sebagai wiraswasta di bidang jasa pariwisata. Selain itu, masyarakat juga memiliki kemauan untuk turut serta menjaga keamanan dan kedamaian di Pantai Lakban.

Unsur kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban terbilang cukup baik. Pada tahap pengambilan keputusan, masyarakat mampu untuk memberikan aspirasi-aspirasi yang bersifat membangun dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di Pantai Lakban. Masyarakat juga mampu mengkritisi program pemerintah yang menurut mereka kurang efektif dan tidak tepat sasaran serta mampu memberi solusi dan melihat peluang dari masalah-masalah yang ada di Pantai Lakban. Kemampuan masyarakat tersebut berasal dari pengalaman dan pengetahuan masyarakat terkait kondisi serta hal-hal mendasar yang dibutuhkan untuk pengembangan pariwisata Pantai Lakban.

Kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam tahap pelaksanaan kegiatan juga terbilang cukup baik. Pada tahap pelaksanaan kegiatan, masyarakat memiliki kemampuan untuk terlibat sebagai buruh dalam membangun tribun, aula dan gapura di Pantai Lakban. Masyarakat juga memiliki kemampuan untuk turut serta menjaga dan memelihara hasil-hasil pembangunan. Masyarakat juga mampu untuk terlibat dalam kegiatan Festival Bentenan Lakban dengan menampilkan tarian katrili, pameran souvenir atau cenderamata, serta perahu hias.

Pada tahap pemanfaatan hasil pembangunan, masyarakat mampu untuk meningkatkan mutu hidup mereka melalui pemanfaatan kios-kios yang ada di Pantai Lakban. Akan tetapi, kemampuan masyarakat untuk memproduksi dan menjual souvenir atau cenderamata di Pantai Lakban masih kurang.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban masih kurang. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban terkendala unsur kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi yang diberikan oleh pemerintah. Kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban masih kurang. Adapun unsur kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban terbilang cukup baik. Walaupun masih ada beberapa kendala berupa kurangnya kemauan dan kemampuan masyarakat untuk memproduksi dan menjual souvenir atau cenderamata di Pantai Lakban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh maka saran dari peneliti adalah pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara kiranya bisa memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat desa Ratatotok Timur untuk berpartisipasi mulai dari tahap pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara juga harus bisa melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang bisa meningkatkan kemauan masyarakat desa Ratatotok Timur untuk berpartisipasi dalam pengembangan pariwisata di Pantai Lakban. Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara harus bisa melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa Ratatotok Timur, khususnya dalam memproduksi souvenir atau cenderamata di Pantai Lakban.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Budianda, Luhur. 2000. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata (Suatu Studi terhadap Partisipasi Masyarakat di Objek Wisata Pantai Air Manis Kelurahan Air Manis Kota Padang)*. Universitas Indonesia, Depok.
- Dalimunthe, Naruddin. 2007. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Wisata Bahari Pantai Cermin Kabupaten Serdang Begadai*. Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Gaghenggang, Enrico. 2016. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Bahari Pulau Bangka Kabupaten Minahasa Utara*. Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Mamonto, Pretty, Sompie, Peggy Mekel. 2012. *Sustainable Development for Post Closure (a case study of PT. Newmont Minahasa Raya)*. Australian Centre for Geomechanics, Brisbane.
- Nurman. 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Suarthana, I Ketut Putra. 2015. *Dampak Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata terhadap Sosial Budaya, Lingkungan, dan*

- Ekonomi: Kajian Komparatif antara Desa Wisata Bedulu, Bali dan Pentingsari, Yogyakarta.* Universitas Udayana, Denpasar.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, dan R&D.* Alfabeta, Bandung.
- Theresia, Aprilia, Krisnha Andini, Prima Nugraha, Totok Mardikanto. (2014). *Pembangunan Berbasis Masyarakat.* Alfabeta, Bandung.
- Tosun, Cevat. 1999. Towards a Typology of Community Participation in the Tourism Development Process. Bilkent University, Ankara/Turkey.
- Varesci, Gabor. 2001. Guiding Principles for Local Authorities in Planning for Sustainable Tourism Development. National Seminar on Sustainable Tourism Development, Jakarta.
- Yoeti, Oka A. 2016. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata.* Balai Pustaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang *Kepariwisataaan.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang *Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara No. 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.*
- Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 3 Tahun 2013 tentang *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara Tahun 2013-2033.*